



Wetlands
INTERNATIONAL

Warta Konservasi Lahan Basah

Vol 25 No.2, Juni 2017



- **Program Building with Nature**
di Pesisir Desa Bedono, Kabupaten Demak,
Jawa Tengah
- Pengukuran Laju Subsiden dan Ketinggian
Muka Air di **Lahan Gambut**
- **Revegetasi Lahan Gambut**
Salah Satu Pilar Utama dalam Merestorasi
Lahan Gambut yang Sudah Rusak
- **World Migratory Bird Day 2017**
Hari Burung Bermigrasi Sedunia

Dari Redaksi

Salam redaksi,

Setiap upaya dan langkah kebaikan yang kita lakukan pastilah akan membuahkan hasil, setidaknya akan tercatat sebagai tabungan amalan ibadah. Seperti semangat dan upaya keras masyarakat Desa Bedono di Kabupaten Demak dalam merehabilitasi kawasan pesisir mereka, akhirnya mendapat balasan kebaikan berupa dukungan pengalokasian dana dari Pemerintah Desanya. Kesinergisan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Bedono tersaji pada kolom fokus lahan basah kali ini.

Sementara pada kolom konservasi lahan basah tersaji teknik sederhana pengukuran laju subsiden dan penurunan muka air tanah di lahan gambut. Subsiden terjadi akibat drainase berlebihan yang akhirnya menyebabkan rusaknya lahan gambut. Nasi sudah menjadi bubur, lalu bagaimana mengelola kembali lahan gambut yang telah rusak? revegetasi adalah salah satu solusi utama.

Selamat membaca.

DEWAN REDAKSI:

Pimpinan Redaksi:

Direktur
Wetlands International Indonesia

Anggota Redaksi:

Triana
Ragil Satriyo Gumilang

“Artikel yang ditulis oleh para penulis, sepenuhnya merupakan opini yang bersangkutan dan Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isinya”



Ditjen. KSDAE,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Daftar Isi

Fokus Lahan Basah

Pemerintah desa Bedono, Alokasikan Dana Tahunan untuk Program Building with Nature (BwN) di Pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah 3

Konservasi Lahan Basah

Pengukuran Laju Subsiden dan Ketinggian Muka Air di Lahan Gambut 4

Berita Lahan Basah

RUU Perkelapasawitan dalam Konteks Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan 6

Revegetasi Lahan Gambut: Salah satu pilar utama dalam merestorasi lahan gambut yang telah rusak 8

Workshop Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove di Kabupaten Indramayu 10

Hari Burung Bermigrasi Sedunia (*World Migratory Bird Day*) 2017 12

Pengamatan Burung Air Migran di Pantai Sidayu Indah, Cilacap 14

Wetlands International Indonesia pada Konferensi Internasional Mangrove: Pemerangkapan Sedimen untuk Pertumbuhan Alami Mangrove, sebuah "Success Story" dalam Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Mangrove 16

Konferensi Nasional Restorasi Hutan Berbasis Masyarakat: Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Restorasi Hutan 17

Dokumentasi Perpustakaan 19

Mengenal Jenis

Kucing Bakau 19

UCAPAN

TERIMA KASIH DAN UNDANGAN

Kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh penulis yang telah secara sukarela berbagi pengetahuan dan pengalaman berharganya untuk dimuat pada majalah ini.

Kami juga mengundang pihak-pihak lain atau siapapun yang berminat untuk menyumbangkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, kliping, gambar dan foto, untuk dimuat pada majalah ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 maksimal 4 halaman A4 (sudah berikuk foto-foto).

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada:

Triana - Divisi Publikasi dan Informasi
Wetlands International Indonesia
Jl. Bango No. 11 Bogor 16161
tel: (0251) 8312189
fax./tel.: (0251) 8325755
e-mail: publication@wetlands.or.id

Pemerintah Desa Bedono, Alokasikan Dana Tahunan untuk Program Building with Nature (BwN) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah

*Didik Fitrianto**

Tanpa terasa, Program Building with Nature (BwN) di Indonesia telah memasuki tahun kedua sejak pertama kali dilaksanakan di sepanjang pesisir Kabupaten Demak, khususnya di 9 (sembilan) desa, yaitu Bedono, Timbulsloko, Surodadi, Tugu, Tambakbulusan, Morodemak, Purworejo, Betahwalang, dan Wedung. Program dengan konsep merehabilitasi kawasan pesisir tanpa menanam ini, sudah dapat terlihat hasil dan perkembangan baiknya. Pembangunan struktur pemerangkap sedimen (semi permeabel) yang dibangun di beberapa pantai yang terabrasi di desa-desa kegiatan, tampak nyata membuahkan hasil. Endapan sedimen sudah mulai

terlihat tertambat di belakang bangunan struktur pemerangkap sedimen (*hybrid engineering/ HE*), dan beberapa lokasi sudah mulai ditumbuhi tanaman pantai terutama mangrove (jenis *Avicennia*).

BwN di Desa Bedono

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun Program BwN melalui kegiatan rehabilitasi pesisir yang dipadukan dengan penguatan perekonomian masyarakat di Desa Bedono, sudah mulai terlihat hasil-hasil positif dan menggembirakan. Di sisi rehabilitasi, sedimen sudah mulai terlihat mengendap di belakang konstruksi HE dan diantaranya endapan sedimen

sudah mulai ditumbuhi bibit-bibit mangrove secara alami tanpa harus perlakuan penanaman. Seiring hal tersebut, kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove sudah mulai tumbuh, terbukti sudah tidak adanya lagi penebangan-penebangan tumbuhan mangrove oleh masyarakat. Bahkan secara sukarela dan swadaya, masyarakat turut aktif dalam pembangunan dan perawatan konstruksi HE. Melalui kegiatan-kegiatan Sekolah Lapang dan pelatihan-pelatihan yang diterapkan Program BwN, masyarakat pesisir Desa Bedono semakin terbelak ilmu tentang bagaimana mengelola lingkungan pesisir mereka secara berkelanjutan.

.....bersambung ke hal 18



Sosialisasi bantuan dana tahunan dari Pemerintah Desa kepada kelompok masyarakat, dalam mendukung kegiatan rehabilitasi pesisir Desa Bedono (Foto: Didik Fitrianto)

Serial Informasi Gambut

Pengukuran Laju Subsiden dan Ketinggian Muka Air di Lahan Gambut*

Seri 2

Tanah gambut terbentuk dari bahan-bahan organik (daun, batang, ranting dan akar tumbuhan), yang terakumulasi dalam lingkungan basah, sedikit oksigen serta keasaman yang tinggi. Tanah gambut tersusun berlapis hingga mencapai ketebalan belasan meter dalam kurun waktu yang sangat lama. Laju akumulasi gambut bervariasi tergantung kondisi setempat, untuk ketebalan gambut antara 5-10 meter diperlukan waktu hingga 10.000 tahunan. Dalam kondisi alami dan tidak terganggu, peran dan fungsi gambut seperti mitigasi banjir, sumber keanekaragaman hayati, sumber pemasok air dan penyimpan karbon akan terus terjaga.

Rusaknya tata kelola air di lahan gambut akibat drainase yang tidak terkendali (pembuatan parit dan saluran), menyebabkan teganggu dan hilangnya peran dan fungsi ekosistem gambut. Air tanah yang ada pada lahan gambut secara cepat mengalir keluar, daya tampung air tanah menjadi kecil dan tinggi muka air tanah turun drastis. Kejadian ini kemudian akan diikuti oleh oksidasi gambut dan penyusutan/ambelasnya (*subsidence*) gambut.

Untuk mengidentifikasi laju subsidensi dan penurunan muka air tanah di lahan gambut, dapat dilakukan dengan cara sederhana.

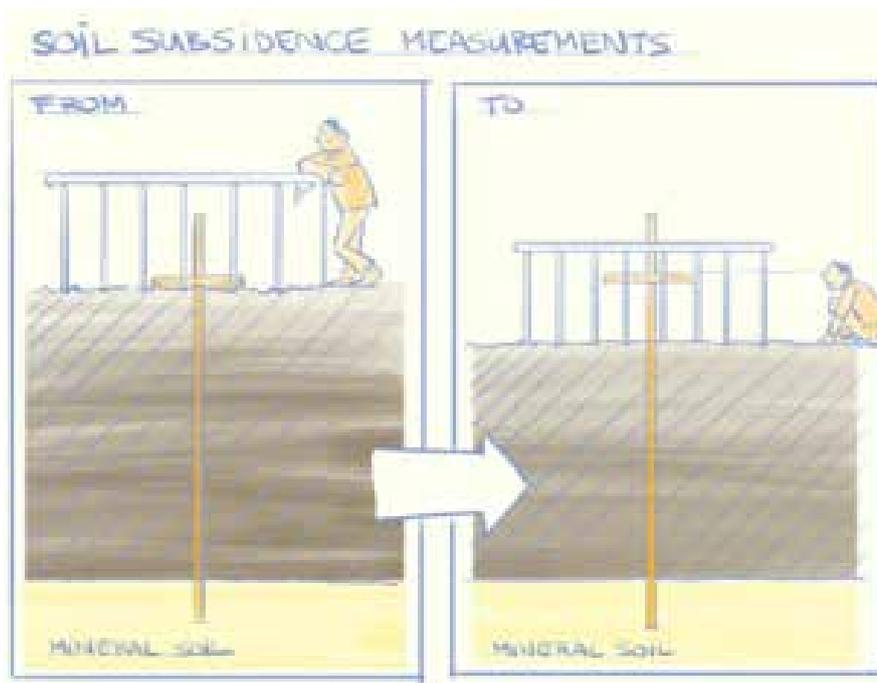
Mengukur penurunan muka tanah gambut (subsidensi)

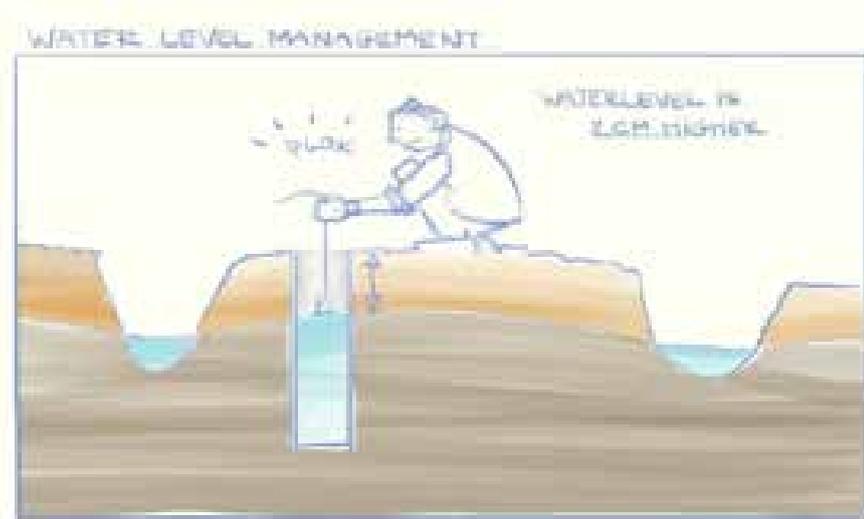
- Gunakan tiang baja atau pipa PVC sebagai alat ukur.
- Tancapkan tiang atau pipa (di tanah gambut) hingga menembus tanah mineral agar stabil (min. 50 cm).
- Tiang berfungsi sebagai penanda permanen yang menunjukkan ketinggian awal muka tanah gambut pada lokasi tersebut
- Pagari areal sekitar tiang subsiden dengan luas 2x2 m agar sistem aman dan tidak terganggu.
- Pembuatan blok tiang pantau subsiden lebih dari satu atau banyak, sebaiknya berisi 1 tiang subsiden di setiap bloknya agar pemantauan akurat dan representatif.
- Setiap saat, penurunan muka tanah gambut dapat dibaca dengan membandingkan tinggi awal tanah, dengan tinggi pada saat perekaman.

Mengukur ketinggian muka air

Untuk mengukur kedalaman air tanah, dapat menggunakan piezometer yang dipasang di tanah gambut, kemudian ketinggian air tanah dapat diukur dengan (misalnya):

- "Plopper", di mana sebuah logam cor cekung terpasang pada pita pengukur dan akan membuat suara "plopping" saat menyentuh permukaan air tanah.





Ketinggian air pada kanal, saluran air, sungai dan badan perairan terbuka lainnya dapat ditentukan dengan ukuran sederhana yang dipasang sedemikian rupa sehingga permukaan air rata rata di atas permukaan laut dapat direkam.

Keberadaan gambut

Peta tanah dan data penginderaan jauh yang ada dapat digunakan untuk mengidentifikasi gambut dan untuk membedakan gambut dari non-gambut. Peta dan data harus selalu diverifikasi dengan sampling lapangan (menggunakan bor khusus tanah gambut/Auger). Pada skala lanskap, pemetaan topografi (misalnya Pemodelan Ketinggian Digital) dan survei lapangan untuk kedalaman gambut akan memberikan gambaran tentang di mana gambut berada. Bila tidak ada data, diperlukan sampling di lapangan.



Kedalaman gambut

Rata-rata kedalaman gambut tropis di Asia Tenggara bervariasi antara 0,5 dan 15 meter. Rata-rata kedalaman gambut dapat ditentukan dengan melakukan pengeboran tanah gambut hingga mencapai lapisan bawah mineral. Jumlah sampel tanah harus mencukupi sehingga memberikan gambaran yang representatif. ••

(Sumber: Roundtable on Sustainable Palm Oil dan Wetlands International)



- "Electric Sounder", di mana sepasang elektroda yang terlindungi oleh kabel isolasi digabungkan dengan pita pengukur air. Saat elektroda bersentuhan dengan permukaan air tanah, maka akan mengaktifkan lampu dan / atau speaker.



Contoh perangkat canggih yang secara akurat dan terus menerus mencatat tingkat air tanah di lapangan adalah e+ WATER L. Pengukuran secara otomatis dilakukan atas dasar kompensasi tingkat tekanan udara yang berbeda. Sensor dapat diprogram oleh pengguna, misal untuk interval pengukuran. Instrumennya bisa digunakan untuk variasi kedalaman air sampai 2 m, tergantung panjangnya.



Untuk mengetahui elevasi air tanah di atas permukaan laut rata-rata, gunakan persamaan berikut:

$$EW = E - D$$

dimana

EW = Ketinggian air di atas permukaan laut rata-rata (m) atau local datum

E = Ketinggian di atas permukaan laut atau local datum pada titik pengukuran (m)

D = Kedalaman air (m)



RUU Perkelapasawitan dalam Konteks Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan

*Ragil Satriyo G.**

Selama kurun waktu tahun 2005-2015, luas perkebunan sawit di Indonesia terus meningkat, dari 5.4 juta ha (2005) menjadi 11.4 juta ha (2015) dengan jumlah produksi sekitar 31 juta ton pada 2015. Bahkan Pemerintah menargetkan jumlah produksi pada 2020 menjadi sebanyak 43 juta ton. Dan diproyeksikan kebutuhan lahan untuk kebun sawit akan meningkat sekitar 54 % dari luas saat ini atau menjadi sekitar 21 juta ha. Cukup beralasan bila berbagai hasil studi menyebutkan bahwa kebun kelapa sawit merupakan salah satu faktor pemicu deforestasi di Indonesia, karena sifat ekspansifnya yang

cepat dalam waktu relatif singkat. Meskipun juga tidak dipungkiri bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang mendatangkan devisa negara sangat besar, termasuk PDB dan penerimaan pajak.

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu prioritas Prolegnas 2016 dan berlanjut untuk tahun 2017. Perkembangan saat ini, RUU tersebut sedang diharmonisasi oleh Badan Legislasi. RUU yang diusulkan oleh DPR RI tersebut pun banyak menuai kontroversi. Jamak pertanyaan muncul, apakah RUU Perkelapasawitan tersebut akan mampu menjawab berbagai

carut-marut persoalan pengelolaan berbasis sumberdaya alam khususnya perkelapasawitan di Indonesia?

Pada Mei 2017, Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup pun melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal permohonan untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan. Gayung pun bersambut. Melalui Menteri Sekretaris Negara RI meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Pertanian RI. Setidaknya terdapat 7 pertimbangan untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan, yaitu: 1) RUU Perkelapasawitan dipandang tidak melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan korporasi industri kelapa sawit yang sebagian



besar adalah asing, 2) UU yang mengatur spesifik perkelapasawitan tidak diperlukan mengingat substansi pengaturan dalam RUU Perkelapasawitan telah diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan, dan UU Nomor 39/2014 mengenai Perkebunan, 3) RUU Perkelapasawitan akan menimbulkan disharmoni pengaturan UU terkait, 4) pengaturan RUU perkelapasawitan dapat mengancam hutan dan gambut dengan cara memutihkan dan melindungi aktivitas ilegal di kawasan hutan, 5) RUU dimaksud lebih memberikan hak istimewa kepada pengusaha besar dibandingkan kesejahteraan petani kecil dan buruh sawit, 6) pengaturan RUU Perkelapasawitan berpotensi memperburuk konflik lahan dan sosial di sektor perkebunan, 7) RUU ini berorientasi kuat untuk memfasilitasi kepentingan asing dan mempertahankan status quo atas dominasi penguasaan lahan di Indonesia serta pembukaan lahan baru dan mengizinkan pengelolaan sawit di lahan gambut yang dilindungi.

RUU Perkelapasawitan dalam Konteks Perlindungan Lahan Gambut

Sejalan dengan pertimbangan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup, Wetlands International Indonesia memandang bahwa isi RUU tersebut belum secara tepat menempatkan persoalan perlindungan lahan gambut. Berikut ini ulasan singkat mengenai draft RUU Perkelapasawitan yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan pengelolaan lahan gambut di Indonesia:

RUU Perkelapasawitan membuka peluang untuk kegiatan pembukaan lahan sebagai salah satu jenis usaha budidaya perkelapasawitan (Pasal 7 Ayat 2). Usaha perkelapasawitan dapat dilakukan di atas tanah mineral

dan/atau gambut (Pasal 22 ayat 2), meskipun tertulis pula bahwa pelaku usaha wajib menjalankan prinsip yang sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 22 ayat 4). Namun, ketentuan tersebut akan bertentangan dengan Inpres Nomor 8/2015 terkait kebijakan penundaan (moratorium) izin baru di hutan alami dan lahan gambut yang berlaku hingga tahun 2017 serta PP Nomor 71/2014 jo. PP Nomor 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam PP Nomor 57/2016 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu (Pasal 26). Namun bila RUU Perkelapasawitan disahkan menjadi Undang-undang, secara konstruksi hukum larangan tersebut menjadi tidak berlaku. Mengingat fungsi ekologis yang sangat penting serta berbagai kebijakan yang telah mengatur tentang pencegahan kerusakan ekosistem gambut seharusnya tidak tertuang sebagai pilihan untuk perluasan lahan usaha perkelapasawitan dalam RUU Perkelapasawitan.

RUU Perkelapasawitan tersebut juga melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran karena tidak ramah lingkungan (Pasal 31). Namun sayangnya, klausul teknik penyiapan lahan yang dilakukan dengan ramah lingkungan, hanya bertujuan untuk: a) mempertahankan kesuburan tanah, b) pengembalian unsur hara, c) mencegah erosi permukaan tanah, d) membantu pelestarian lingkungan. Tujuan dalam ketentuan tersebut belum secara jelas mencantumkan tentang pentingnya mempertahankan lahan gambut tetap dalam kondisi basah (menjaga muka air tanah) dan mencegah penurunan muka tanah (subsistensi). Berbagai studi menyebutkan bahwa penggunaan lahan gambut berbasis drainase sangat tidak berkelanjutan

baik dari segi lingkungan maupun dari segi ekonomi akibat penurunan permukaan tanah atau subsidi yang merupakan dampak besar dari drainase. Pada lahan perkebunan tanah gambut dengan drainase di daerah tropis, tingkat subsidi jangka panjang adalah antara 3 sampai dengan 5 cm per tahun dan didahului dengan penurunan awal lebih dari satu meter setelah terjadi pengeringan. Selain itu, subsidi lahan gambut serta emisi karbon terkait tidak dapat dihentikan jika lahan gambut tersebut dikeringkan dengan drainase buatan. Drainase di lahan gambut, juga merupakan faktor utama yang menyebabkan lansekap gambut sangat rentan terhadap kebakaran pada musim kemarau.

Singkatnya, RUU ini berusaha memberi legitimasi pembukaan lahan gambut untuk usaha perkelapasawitan, namun tidak mengindahkan faktor pemicu utama penyebab kerusakan ekosistem gambut seperti pengeringan berbasis drainase.

Lebih jauh lagi, ketentuan mengenai tata air di dalam RUU tertulis bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diarahkan untuk menyediakan pembinaan dan fasilitas jaringan irigasi dalam areal budidaya perkelapasawitan bagi pelaku usaha perkelapasawitan (Pasal 57 ayat 2). Fasilitas jaringan irigasi usaha perkelapasawitan yang berada di lahan gambut, secara eksplisit juga dapat ditafsirkan sebagai drainase, akan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab mengenai dampak drainase juga secara otomatis akan melekat pada Pemerintah. Bila demikian, lalu bagaimana dengan tanggung jawab pelaku usaha bila tanggung jawab pembangunan fasilitas termasuk dampak usaha perkelapasawitan di lahan gambut hanya dibebankan kepada Pemerintah? ••

Policy Officer of PFRSP & IPSP Project

Revegetasi Lahan Gambut

Salah satu pilar utama dalam merestorasi lahan gambut yang telah rusak

Alue Dohong* dan Iwan Tri Cahu W.**

Hutan rawa gambut memiliki peran, fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi manusia, keanekaragaman hayati dan iklim global. Namun sayang, ekosistem ini mengalami kerusakan dari tahun ke tahun. Pengeringan berlebihan (melalui pembangunan kanalisasi), kebakaran, penebangan, dan alih fungsi lahan merupakan beberapa faktor utama penyebab degradasi hutan rawa gambut di Indonesia. Kebakaran hutan dan gambut pada tahun 2015 telah menyebabkan bertambah luasnya lahan gambut yang rusak dan terdegradasi.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam menangani permasalahan serta perbaikan tata kelola di

lahan gambut. Melalui penerbitan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 01 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan diberikan mandat untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi lahan gambut seluas 2 (dua) juta hektar di 7 (tujuh) provinsi hingga tahun 2020. Dalam menjalankan mandatnya, BRG menerapkan tiga pilar utama yang dikenal sebagai 3R yaitu R1: *Rewetting of peat* (Pembasahan kembali gambut), R2: *Revegetation* (Restorasi/rehabilitasi vegetasi) dan R3: *Revitalisation of local livelihoods* (revitalisasi mata pencaharian).

Pembasahan kembali gambut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut

antara lain: sekat kanal (*canal blocking*), penimbunan kanal (*canal backfilling*), dan sumur bor (*deep wells*); sedangkan revegetasi gambut dilaksanakan melalui intervensi aktif seperti: pembuatan persemaian, pembibitan dan penanaman; maupun intervensi non-aktif seperti mempromosi regenerasi alami (*natural regeneration*) dan promosi agen penyebar benih (*seeds dispersal mechanism*). Sementara itu, kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian dilaksanakan dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber mata pencaharian alternatif dan berkelanjutan yang ramah gambut baik berbasis lahan (*land-based*), berbasis air (*water-based*), dan berbasis jasa lingkungan (*environmental services-based*).



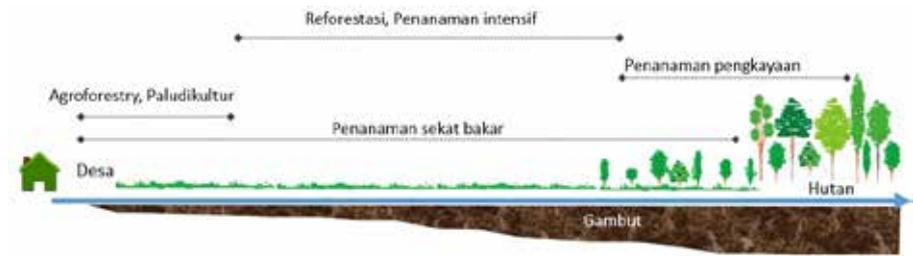
Konsep dan ruang lingkup

Revegetasi merupakan salah satu pilar utama dalam restorasi gambut dimana kegiatannya tertuju pada upaya restorasi atau rehabilitasi vegetasi suatu lahan setelah mengalami gangguan atau kerusakan. Dalam implementasinya, revegetasi diintegrasikan dengan dua pilar restorasi gambut lainnya yaitu rewetting dan revitalisasi mata pencaharian. Kegiatan revegetasi harus dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang benar. Lebih lanjut, kegiatan revegetasi sedapat mungkin harus melibatkan para pihak terutama masyarakat agar dapat memberikan nilai tambah bagi mereka, serta menjamin kelangsungan program di masa mendatang.

Berbeda dengan kegiatan yang lain, revegetasi memiliki tantangan yang lebih berat karena tujuan akhir dari kegiatan bukanlah berapa jumlah tanaman yang ditanam, melainkan berapa tanaman yang bertahan hidup. Atas dasar hal ini, maka kegiatan revegetasi harus direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Proses dalam kegiatan revegetasi sangat menentukan hasil dari suatu kegiatan.

Jenis tanaman, lokasi dan opsi intervensi

Jenis tanaman untuk revegetasi lahan gambut sedapat mungkin harus mengedepankan jenis-jenis asli yang tumbuh di hutan rawa gambut. Pemilihan jenis tanaman seharusnya tidak hanya terfokus pada jenis pohon komersial saja, melainkan juga jenis-jenis lain yang memiliki peran penting (misal: penghasil buah, habitat satwa, penutup lahan dan lain lain).



Beberapa opsi pola revegetasi lahan gambut

Penanaman dengan banyak jenis sangat direkomendasikan agar komposisi tegakan hasil kegiatan revegetasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan sebaliknya, penanaman sejenis atau sedikit jenis sebaiknya dihindari.

Pola tanam dan pengaturan kegiatan bisa berbeda-beda sesuai dengan tutupan lahan, letak lokasi penanaman, ketebalan gambut, dan status penguasaan lahan atas lokasi yang akan ditanami. Sebagai contoh: untuk lokasi bergambut tipis, berada di dekat pemukiman, dan statusnya berada di dalam penguasaan masyarakat/adat, maka revegetasi dapat memilih sistem budidaya berbasis masyarakat, misalnya wanatani (*agroforestry*) atau paludikultur (*paludiculture*). *Agroforestry* mengacu sistem budidaya yang memadukan tanaman hutan dan tanaman semusim. Sementara paludikultur merupakan sistem budidaya di lahan basah, atau yang dibasahi kembali (apabila lahan telah terlanjur mengalami pengeringan) dengan jenis-jenis tanaman asli. Sementara untuk lahan gambut dengan kedalaman sedang hingga dalam dan berada jauh dari desa (atau mendekati hutan), maka penghutan kembali (*reforestasi*) melalui penanaman intensif (*intensive planting*) sebaiknya dilakukan. Dalam rangka mengurangi resiko terhadap kebakaran, penanaman sekat bakar (*green fire break*) bisa diintegrasikan dengan sistem penanaman yang lain. Sekat bakar dibuat dengan cara menanam beberapa jenis tanaman asli gambut

yang memiliki adaptasi tinggi terhadap api dengan jarak tanam yang rapat. Sementara untuk hutan rusak berat yang miskin jumlah dan jenis pohon, maka penanaman pengkayaan (*enrichment planting*) dengan jenis tanaman asli gambut bisa dilakukan.

Panduan Teknis

Dalam upaya mendukung suksesnya program revegetasi, BRG saat ini telah merampungkan sebuah dokumen berupa panduan teknis dan tata cara revegetasi, yang ditulis oleh Alue Dohong (BRG) dan Iwan Tri Cahyo Wibisono (WII). Panduan ini terbagi menjadi tiga bagian yang merefleksikan kegiatan utama dalam revegetasi yaitu pembuatan persemaian, penyiapan bibit, penanaman dan pemeliharaan. Pada masing-masing bagian tersebut, diuraikan tahapan dan tata cara dalam mengimplementasikan kegiatan di lapangan. Dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan ilustrasi, panduan ini diharapkan dapat mudah dimengerti sehingga dapat diterapkan oleh pelaksana revegetasi di lapangan.

Diharapkan dalam waktu dekat buku "Panduan revegetasi lahan gambut" dapat segera diterbitkan. ••

* Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, BRG

** Koordinator Program Konservasi dan Restorasi Lahan Basah, WII

Workshop Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove di Kabupaten Indramayu

*Triana **

Pesisir Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kawasan yang menjadi lokasi kegiatan Wetlands International Indonesia (WII) sejak tahun 1990an. Diawali kegiatan konservasi burung air, berupa pelatihan pencincinan burung air dan survey perburuan burung air migran. Kegiatan ini dilakukan di tengah maraknya isu perburuan dan penangkapan burung air oleh masyarakat setempat sebagai sumber pendapatan alternatif. Studi pertama mengenai perburuan burung dilakukan oleh Alikodra pada tahun 1979 menunjukkan bahwa hampir satu juta burung telah ditangkap. Kemudian beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk daerah Indramayu dan Cirebon diperkirakan jumlah burung air

yang ditangkap antara 1 Juli 1985 – 25 Juni 1986 sebanyak 253.050 ekor (Milton dan Murhadi, 1989 dalam Rusila dan Indrawan, 1990).

Pada tahun 1994 kegiatan dilanjutkan dengan Pendidikan Lingkungan Hidup bagi sekolah-sekolah di Indramayu dan Cirebon. Kegiatan PLH tersebut bekerja sama dengan para guru-guru di Indramayu dan Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pegetahuan Alam (PPPG IPA).

Konservasi ekosistem dan habitat

Menyadari pentingnya ekosistem hutan mangrove bagi pelestarian burung air, maka pada tahun 1998 WII mengadakan program Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup

mengenai Ekologi Lahan Basah dan Pembangunan Berkelanjutan di Indramayu, yang ditujukan bagi guru-guru SD dan SMP. Saat itu terbentuk suatu Forum Komunikasi Guru Pencinta Lingkungan Hidup (FKGPLH) Indramayu yang beranggotakan guru-guru SD dan SMP di Indramayu.

Konservasi dan pengembangan perekonomian masyarakat

Di tahun yang sama yaitu 1998, WII memperkuat kegiatannya dengan menerapkan program terpadu antara kegiatan rehabilitasi kawasan dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Diharapkan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, tidak ada lagi penebangan pohon (mangrove) atau perburuan burung air di Indramayu.



PLH Mangrove di Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu pelopor rehabilitasi mangrove di pantai utara Pulau Jawa. Melalui program konservasi mangrove yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangsong dengan dukungan PT. Pertamina RU VI Balongan, kini Kabupaten Indramayu memiliki satu daerah tujuan wisata khusus yaitu Ekowisata Mangrove Karangsong. Areal konservasi mangrove ini telah dideklarasikan oleh Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan sebagai Mangrove Center untuk keperluan penelitian, pendidikan dan ekowisata.

Untuk mendukung penguatan dan keberlanjutan program pelestarian hutan mangrove dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan PT. Pertamina RU VI Balongan, pada tanggal 17 s/d 22 Mei 2017 telah menyelenggarakan Workshop Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik mangrove untuk Guru-Guru Sekolah Dasar Kabupaten Indramayu. Kegiatan workshop ini ditangani oleh Tim Fasilitator yang terdiri atas beberapa perwakilan lembaga, yaitu: Puslitbang KLHK (Hendra Gunawan, selaku ketua), Pusdiklat SDM KLHK (Adi Susmianto), Balai

Diklat SDM KLHK (Diah Zuhriana), LIPI (Sugiarti), IPB (Siti Badriyah), ITB (Tien Lastini), CIFOR (Dede Rohadi & Tuti Herawati), dan Wetlands International Indonesia (Triana).

Peserta diikuti oleh 20 guru yang berasal dari 11 SD perwakilan 11 Kecamatan Indramayu, dengan menghadirkan nara sumber dari Dinas Pendidikan Kab. Indramayu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Indramayu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indramayu, BAPPEDA Kab. Indramayu, LSM Laut Lestari (Bpk. Eka) dan Puslitbanghut, Badan Litbang dan Inovasi, KLHK.

Tujuan umum workshop adalah untuk membangun kesepahaman dan sinergitas aksi pelestarian mangrove dari berbagai pihak di Kabupaten Indramayu, antara lain di sektor pendidikan, perencanaan pembangunan, dinas sektoral terkait dan masyarakat.

Semangat dan harapan dari para guru-guru serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kab. Indramayu (cq. Dinas Pendidikan) dan PT Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, menjadi kunci utama suksesnya acara workshop.

Tim (fasilitator) telah merumuskan rancangan kurikulum konservasi mangrove pada hari terakhir

workshop, yang seluruh materi/ isinya merupakan aspirasi dari para guru peserta. Rancangan kurikulum tersebut disepakati seluruh peserta termasuk usulan Kepala Dinas Pendidikan, yaitu diperuntukkan siswa-siswi SD Kelas 4, 5 dan 6.

Awalnya PLH tematik Mangrove diusulkan masuk ke kurikulum Muatan Lokal, namun dikarenakan muatan lokal di Kabupaten Indramayu sendiri sudah ada yaitu Bahasa Indramayu, maka untuk saat ini Dinas Pendidikan Kab. Indramayu menyepakati untuk masuk ke program ekstra kurikuler wajib (khusus untuk sekolah-sekolah di sekitar pesisir).

Sebagai tindak lanjut dari workshop, tim fasilitator kemudian akan melakukan penyusunan dan pembentukan Buku Panduan PLH Mangrove Indramayu, dengan target di pertengahan hingga akhir tahun 2017 ini Draft Panduan yang akan disusun nanti sudah dapat diujicobakan setidaknya ke sekolah-sekolah peserta workshop. Harapan besar adalah Panduan PLH tematik Mangrove akan kembali disosialisasikan lebih luas lagi ke seluruh sekolah sasaran di 33 kecamatan di Kabupaten Indramayu. Semoga. ••

** Staff Publikasi dan Informasi
Wetlands International Indonesia*



Peserta dan Tim Fasilitator Workshop PPLH Tematik Mangrove berfoto bersama.

Hari Burung Bermigrasi Sedunia (*World Migratory Bird Day*) 2017

*Yus Rusila Noor**

Migrasi merupakan kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam dunia binatang, migrasi biasanya diartikan sebagai perpindahan, baik secara horizontal maupun vertikal, yang dilakukan pulang-pergi secara teratur dimaksudkan untuk menghindari kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan kehidupannya. Kegiatan migrasi sangat nampak terlihat dalam dunia burung. Setiap tahun, jutaan ekor burung melakukan migrasi dari lokasi tempat mereka berbiak menuju lokasi lain yang secara ekologis dapat menyediakan kebutuhan untuk makan dan melanjutkan hidupnya. Hal tersebut umumnya terjadi akibat kondisi cuaca ekstrim yang menimpa lokasi tempat berbiak. Selama musim dingin, tempat mereka berbiak akan dipenuhi dengan salju, sehingga harus mencari tempat yang lebih hangat dan menyediakan sumber makanan yang berlimpah.

Migrasi di dunia burung adalah merupakan fenomena alam yang luar biasa. Makhluk bersayap yang ukurannya rata-ratanya sekepalan orang dewasa tersebut sanggup melakukan terbang jarak jauh hingga ribuan atau bahkan belasan ribu kilometer pulang-pergi. Burung Kedidi merah *Calidris*

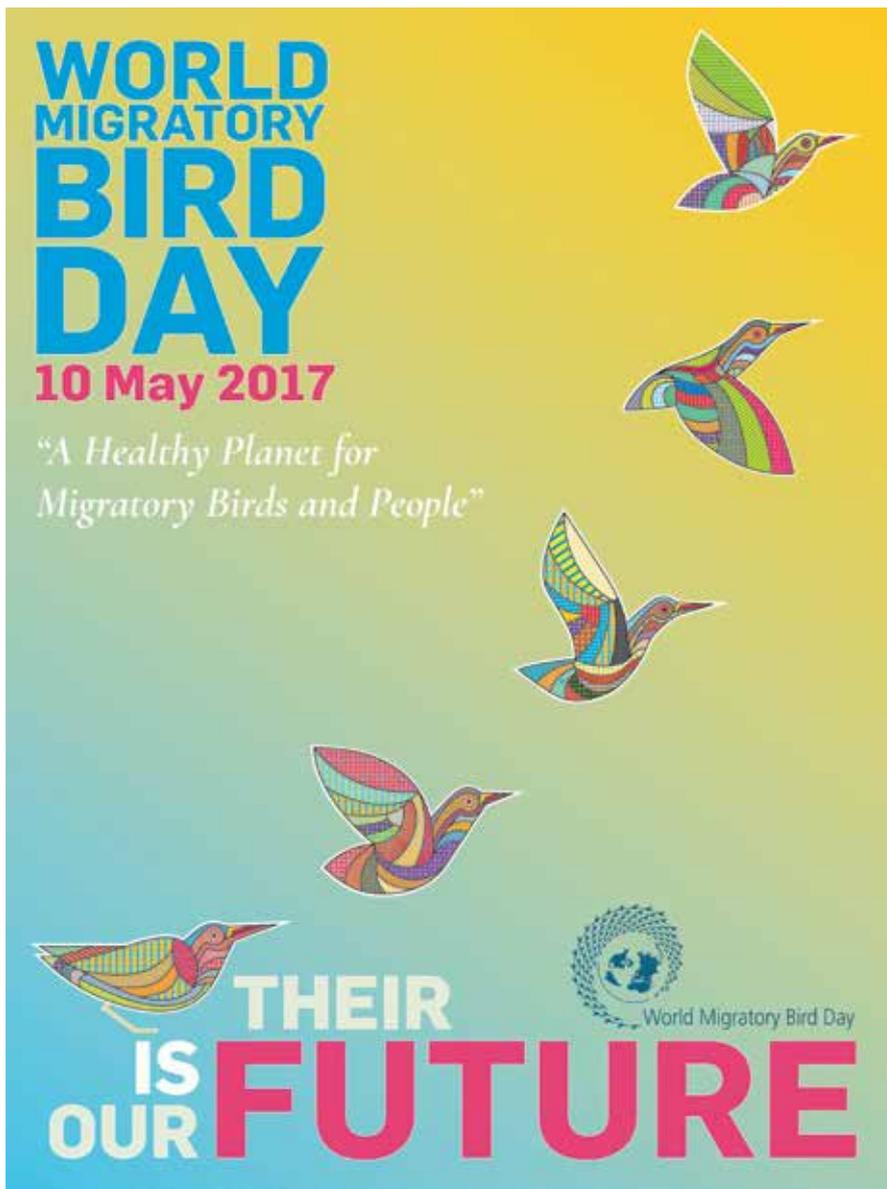
canutus, misalnya, yang berukuran dari ujung paruh sampai ke ujung ekor sekitar 24 cm, sanggup melakukan perjalanan sepanjang 16.000 kilometer setahun dua kali. Mereka berbiak di Siberia dan selama musim dingin melakukan migrasi hingga ke ujung selatan Afrika. Ada pula puluhan jenis lainnya yang berbiak di Siberia dan kemudian memilih jalur migrasi melewati Asia Timur, Asia Tenggara (termasuk Indonesia) hingga ke pulau-pulau di wilayah Pasifik. Mereka telah dibekali dengan struktur morfologi, fisiologi dan kemampuan terbang serta menentukan arah yang hingga saat ini masih merupakan bagian penelitian dari para ahli.

Di sepanjang perjalanannya burung-burung bermigrasi tersebut singgah di lokasi-lokasi tertentu untuk beristirahat dan mencari makanan sebagai bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan panjangnya. Lokasi tempat mencari makan burung migran merupakan bagian yang sangat vital dan berharga dalam perjalanan hidup mereka. Itulah sebabnya, diperlukan kerjasama internasional untuk secara bersama-sama melindungi habitat tempat burung bermigrasi singgah.

Menyadari adanya kebutuhan untuk kerjasama internasional

di antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, para ilmuwan dan masyarakat, pada tahun 1993 digagas suatu kegiatan khusus di Amerika Serikat yang diberi nama *International Migratory Bird Day* (IMBD). Acara tersebut berjalan sukses dan menarik perhatian banyak pihak untuk terlibat di dalamnya. Namun demikian, kesuksesan acara tersebut hanya berlaku di belahan bumi barat saja, dan kurang menyentuh wilayah lainnya. Untuk membawa gaung pelestarian secara lebih luas, organisasi *African-Eurasian Migratory Waterbirds* (AEWA) menyelenggarakan acara *Migratory Waterbirds Day* yang meliputi wilayah Afrika, Eropa dan sebagian Asia, bertepatan dengan ulang tahun ke-10 organisasi tersebut pada tahun 2005. Pada pertemuan tersebut juga disepakati untuk melakukan kegiatan yang meliputi seluruh wilayah bumi. Perayaan *World Migratory Bird Day* (WMBD) kemudian diluncurkan pada tanggal 8 – 9 April 2006 oleh AEWA dan *Convention on Migratory Species* (CMS) di Kenya. Sejak itulah WMBD diperingati setiap tahun secara global dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat secara luas.

WMBD diperingati setiap tahun dengan mengusung tema tertentu yang dirasakan sesuai dengan



kondisi pada tahun tersebut. Pada perayaan pertama tahun 2006, saat itu burung bermigrasi mendapat tuduhan berat sebagai penyebar virus flu burung, meskipun tidak ada bukti ilmiah mengenai hal tersebut. Itulah sebabnya pada tahun tersebut tema yang diusung adalah "Migratory birds need our support now!" yang menggambarkan perlunya dukungan untuk kelangsungan hidup burung bermigrasi. Tahun 2014 adalah merupakan tahun dengan jumlah perayaan terbanyak yang pernah tercatat, yaitu 400 acara yang berlangsung di 85 negara. Karena

tahun tersebut bertepatan dengan maraknya upaya untuk mendorong pariwisata yang berwawasan lingkungan, maka perayaan pada tahun 2014 mengambil tema "Destination Flyways: Migratory Birds and Tourism". Tema ini mengusung hubungan antara konservasi burung bermigrasi, pengembangan masyarakat lokal dan wisata berbasis alam di seantero dunia. Sementara itu, untuk tahun 2017 tema yang diusung adalah "Their future is our Future. A healthy planet for migratory birds and people". Dengan tema tersebut,

WMBD 2017 ingin menunjukkan adanya keterhubungan erat antara manusia dan alam, khususnya manusia dan satwa bermigrasi, terutama burung, karena semuanya tinggal di planet yang sama, dan dengan demikian menggunakan sumber daya terbatas yang sama. Tema tersebut ingin mengatakan bahwa konservasi untuk burung melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah juga penting bagi kelanjutan masa depan umat manusia.

Perayaan WMBD melibatkan demikian banyak pihak di seluruh dunia. Wetlands International merasa bangga karena secara global telah terlibat dari awal dalam perayaan tersebut. Wetlands International bersama-sama dengan UNEP, CMS, AEWA, BirdLife International, East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) dan International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) adalah merupakan *Founding Partners* untuk *World Migratory Bird Day*. Di Indonesia, Wetlands International Indonesia mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merayakan WMBD. Pada tahun 2017, Wetlands International Indonesia memfasilitasi Sekretariat *East Asian-Australasian Flyway Partnership* untuk memberikan dukungan finansial kepada 6 organisasi untuk melakukan perayaan WMBD. Di samping itu, Staf kami juga terlibat langsung dalam perayaan di Jakarta, Gorontalo, Jambi dan Papua. ••

#TheirFutureOurFuture
#WMBD2017 #WMBD #Indonesia

*Head of Programme -
Wetlands International Indonesia*

World Migratory Bird Day (WMBD) 2017

Pengamatan Burung Air Migran di Pantai Sidayu Indah, Cilacap

Tim WMBD Bio-Explorer, Tim SONI** dan Elisabet RRBH****

WMBD merupakan aksi konservasi yang dirayakan setiap tahun untuk memonitoring burung bermigrasi diseluruh dunia. Indonesia termasuk dalam jalur migrasi yaitu East Asia-Australasia Flyway Partnership (EAAFP). Burung air migran setiap tahunnya bermigrasi melintasi dan berhenti pada titik-titik lahan basah di Indonesia. Untuk memperingati WMBD tahun 2017, kami para pemerhati lingkungan telah melakukan pengamatan burung air migran pada tanggal 6 Mei di sekitar pantai Sidayu Indah, Cilacap. Kegiatan memang lebih cepat dari tanggal peringatan yang telah ditetapkan yaitu setiap tanggal 10 Mei di seluruh dunia.

Pantai Sidayu Indah Cilacap merupakan kawasan pantai berpasir yang telah didominasi tambak-tambak budidaya perikanan, yang berjarak sekitar 5 km dari wisata pantai Widarapayung.

Pengamatan kali ini menggunakan metode titik konsentrasi (concentration count) yang dilakukan dipagi hari sekitar 2 jam. Alat yang kami gunakan untuk standar pengamatan burung antara lain kamera, buku panduan MacKinnon et al. (1999), Message dan Taylor (2005), binokuler, tallysheet dan alat tulis. Kami mencatat 4 spesies burung pantai yaitu *Charadrius javanicus* Chasen, 1938, *Charadrius mongolus* Pallas,

1776, *Charadrius leschenaultii* Lesson, 1826 dan *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776) dimana 3 diantaranya berstatus migran dan 1 penatap (MacKinnon et al. 1999; Sukmantoro et al. 2007). Indonesia yang terdiri berbagai pulau memunculkan endemisitas yang tinggi bagi taksa burung. Spesies *C. javanicus* Chasen, 1938 merupakan spesies endemik di Pulau Jawa (MacKinnon et al. 1999). Menurut IUCN (2017) spesies *C. javanicus* berstatus Near-Threatened (NT) dengan sebaran terbatas dan populasi yang kecil di Pulau Jawa. Selain itu, spesies *Calidris ruficollis* juga berstatus Near-Threatened (NT) sebagai burung migran di Indonesia yang setiap tahunnya kembali di pesisir selatan Pulau Jawa baik berkelompok ataupun tidak.



Pengamatan burung pantai bermigrasi di Pantai Sidayu Indah, Cilacap

Saat melakukan pengamatan, ada pemandangan yang cukup memprihatinkan, yaitu banyaknya sampah-sampah (domestik) yang ditemui di sekitar pantai yang terbawa arus ombak. Kondisi ini tentu selain merusak keindahan pantai, juga sangat mengganggu habitat pantai sebagai tempat singgah burung air migran. Bukan hal yang tidak mungkin apabila pencemaran ini terus dibiarkan dan bahkan bertambah parah ke depannya, burung-burung air migran bisa jadi enggan untuk singgah. Sangatlah tepat apabila peringatan WMBD kali ini yang bertema "Masa Depan Mereka adalah Masa Depan Kita", dijadikan momentum untuk kita lebih peduli dan menjaga pantai Sidayu Indah Cilacap dari pencemaran. Saatnya kita semua terutama masyarakat Cilacap, untuk tidak membuang sampah ke sungai-sungai, karena selain berdampak mencemari kesehatan sungai, juga berdampak buruk bagi muara-muara sungai di hilirnya, dan lebih parah lagi dapat menimbulkan risiko bencana yang lebih besar seperti banjir. Bersih dan sehatnya sungai-sungai di hulu, tentu akan menyehatkan pula muara-muara pantai di hilirnya, seperti pantai Sidayu Indah Cilacap. Sehingga

burung air (migran) yang merupakan spesies yang cukup rentan terhadap perubahan lingkungan, dapat terjaga dan lestari. SEMOGA ••

DAFTAR REFERENSI

[Bibby C, Jones M, Marsden S. 2000. Teknik-teknik Ekspedisi Lapangan: Survei Burung. Sozer R, Nijman V, Shannaz J, editor. Bogor (ID): Birdlife International Indonesia Programme. Terjemahan dari: Expedition Field Techniques: Bird Surveys.

[EAAFP-East Asia-Australasian Flyway Patnership]. 2017. World Migratory Bird Day 2017. Diakses pada tanggal 28 Mei. Di www.eaaflyway.net/our-activities/wmbd/wmbd2017/#about

[IUCN-International Union Conservation for Nature]. 2017. *Calidris ruficollis*. Diakses pada tanggal 28 Mei. Di www.iucnredlist.org/details/22693383/0

[IUCN-International Union Conservation for Nature]. 2017. *Charadrius javanicus*. Diakses pada tanggal 28 Mei. Di www.iucnredlist.org/search

MacKinnon J, Philipps K, van Balen B. 1999. Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Bogor (ID): Burung Indonesia.



Beberapa tim pengamatan WMBD 2017 di Pantai Sidayu Indah, Cilacap

Message S, Taylor D. 2005. Field Guide Waders of Europe, Asia, and North America. China (CN): 1010 International.

Sukmantoro W, Irham M, Novarino W, Hasudungan F, Kemp N, Muchtar M. 2007. Daftar Burung Indonesia no.2. Bogor (ID): Indonesian Ornithologist' Union.

*) UKM Himpunan Mahasiswa Bio-Explorer Fakultas Biologi, UNSOED, Purwokerto

***) Gerakan Save Our Nusakambangan Island, Cilacap, Jawa Tengah

****) anggota alumni UKM Himpunan Mahasiswa Bio-Explorer Fakultas Biologi, UNSOED, Purwokerto



Charadrius mongolus



Charadrius leschenaultii



Calidris ruficollis



Charadrius leschenaultii dan *Charadrius javanicus*

Wetlands International Indonesia pada Konferensi Internasional Mangrove

Pemerangkapan Sedimen untuk Pertumbuhan Alami Mangrove sebuah "Success Story" dalam Pendekatan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Bali, 19 April 2017 -- Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove adalah merupakan suatu keniscayaan untuk mendukung tingkat keberhasilan yang tinggi. Pemanfaatan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam melakukan pemerangkapan sedimen untuk mengembalikan lahan yang bisa ditumbuhi mangrove secara alamiah di Banten adalah merupakan salah satu contoh success story. Hal tersebut ditegaskan oleh I Nyoman Suryadiputra, Head of Office Wetlands International Indonesia, dalam presentasinya pada Konferensi Internasional Mangrove di Bali, 18 – 21 April 2017.

Wetlands International telah melakukan kegiatan pemerangkapan sedimen untuk pertumbuhan alami mangrove tersebut di wilayah Banten, Flores, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun struktur bangunan sederhana, tidak terlalu mahal dan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lokasi setempat. Masyarakat diikutsertakan secara penuh dalam berbagai kegiatan tersebut, mulai dari persiapan, pelaksanaan di lapangan, hingga pemantauan dan perawatan struktur bangunan pemerangkap sedimen. Bagi masyarakat yang terlibat pada seluruh kegiatan tersebut, diberikan kompensasi

berupa dana pinjaman tanpa bunga untuk pengembangan usaha guna meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Jika dalam waktu tertentu yang telah disepakati kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat membuahkan hasil yang mencukupi, maka kemudian pinjaman tanpa bunga tersebut akan diubah menjadi hibah. Mekanisme pinjaman tanpa bunga bersyarat tersebut kemudian dikenal dengan istilah mekanisme Bio-Rights. ••

(Dilaporkan oleh Ragil Satriyo G.)



Konferensi Nasional Restorasi Hutan Berbasis Masyarakat

Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Restorasi Hutan

Restorasi hutan seharusnya secara aktif melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatannya, khususnya masyarakat terdampak di sekitar kawasan hutan. Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi berbagai masalah akibat kerusakan hutan, termasuk upaya restorasinya. Atas dasar itulah, sejumlah organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah hingga nasional berkumpul untuk menyamakan pemahaman dan menyusun konsep resolusi mengenai restorasi hutan yang berbasis masyarakat.

Melalui "Konferensi Nasional Restorasi Hutan Berbasis Masyarakat" yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Palembang, Wetlands International Indonesia turut serta dan berkontribusi secara aktif dalam kegiatan tersebut. Irwansyah Reza Lubis, Program Coordinator Community, Biodiversity and Climate Change – Wetlands International Indonesia, memberikan pemaparan mengenai pendekatan restorasi lahan gambut berbasis bentang alam dan memberikan perhatian serius mengenai pentingnya pelibatan masyarakat. Restorasi lahan gambut harus diupayakan untuk mengatasi banyaknya saluran-saluran drainase di lahan gambut yang menguras air gambut dalam jumlah besar sehingga menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Sebagai contoh kebakaran lahan gambut daerah Semenanjung



Kampar, Riau, antara tahun 2000-2015 hampir seluruh titik api (99%) terjadi di dalam perkebunan yang terpengaruh drainase. Selain itu, drainase juga telah menyebabkan subsidensi dan diperkirakan akan meningkatkan risiko banjir dalam jangka panjang. Restorasi lahan gambut secara parsial, misalnya dengan hanya restorasi tegakan, restorasi sebagian kecil lahan tanpa mempertimbangkan penggunaan lahan lain disekelilingnya di dalam satu kesatuan hidrologis, bisa mengancam keberhasilan restorasi.

Konferensi ini telah merumuskan beberapa resolusi dan mendesak agenda restorasi dan konservasi harus mengedepankan kepentingan dan hak masyarakat terdampak. Terutama terkait isu resolusi konflik dengan mendorong penyediaan informasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas yang memadai bagi masyarakat.

Selain itu, restorasi berbasis masyarakat sinergis dengan pengembangan ekonomi ramah



lingkungan, inovatif dan berbasis tanaman lokal. Dalam kerangka pembasahan kembali lahan gambut, praktek pengelolaan lahan gambut perlu diubah dari berbasis drainase menjadi tanpa drainase dengan menggunakan jenis tanaman lokal gambut yang memiliki kesesuaian dengan kondisi basah (paludikultur), seperti sagu, purun, tengkawang, jelutung, rotan dan jenis-jenis lainnya.

Konferensi ini juga mengkritisi pelaksanaan kegiatan *Bonn Challenge*. Kegiatan konferensi tingkat tinggi yang diikuti oleh puluhan delegasi negara anggota, termasuk Indonesia, harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Kegiatan *Bonn Challenge* harapannya bukan sebagai sarana pemaafan atas praktek buruk dan pelanggaran hukum yang masih banyak dilakukan oleh banyak perusahaan kehutanan, termasuk di Indonesia. ••

(Dilaporkan oleh Ragil Satriyo G.)

..... sambungan dari halaman 3

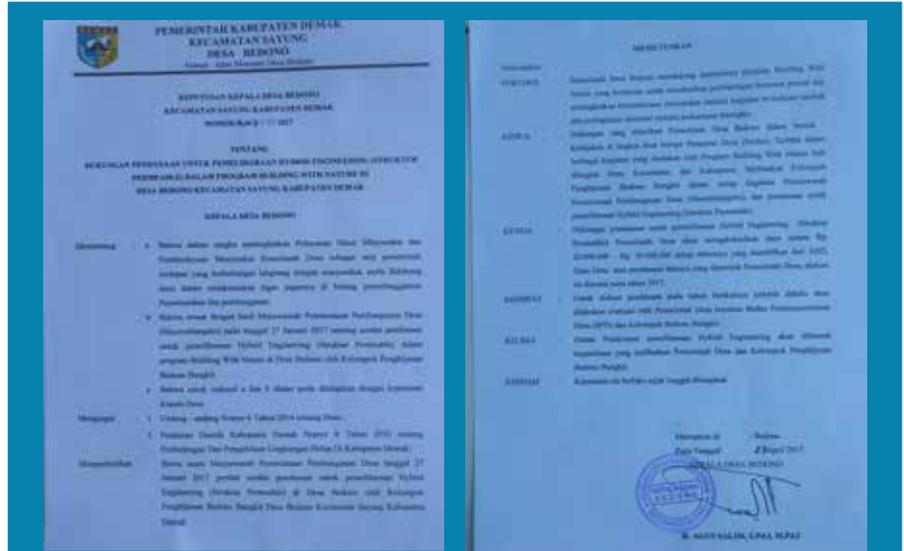
Program Building with Nature di Pesisir Desa Bedono, Kabupaten Demak

Tidak hanya itu, sumber pendapat masyarakat juga sudah mulai meningkat dengan adanya program *Biorights* berupa peminjaman modal usaha yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu oleh Program BwN.

Perkembangan positif yang telah ditunjukkan Program BwN serta kuatnya keterlibatan aktif masyarakat, telah menggugah Pemerintah Desa Bedono untuk mendukung keberlanjutan dan kelancaran Program BwN di desanya. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok mitra yang memaparkan dan mengusulkan kondisi dan harapan mereka melalui pertemuan-pertemuan Musrembangdes. Masyarakat sangat berharap agar penguatan ekosistem pesisir dan masyarakat Desa Bedono juga mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah desanya, dan tidak hanya datang dari pihak-pihak dari luar desa.

Dukungan Alokasi Dana dari Pemerintah Desa

Gayung bersambut, semangat dan niat baik masyarakat mendapat sambutan menggembirakan dari Pemerintah Desa Bedono. Melalui proses diskusi panjang dalam penyusunan RPJMDes, akhirnya usulan dari Kelompok Penghijauan Bedono Bangkit disetujui oleh pemerintah desa dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa No 0452/105/15/2017 tentang Dukungan Pendanaan untuk Pemeliharaan *Hybrid Engineering* (struktur bendungan permeabel) dalam Program Building with Nature. Dalam SK tersebut Pemerintah Desa mengalokasikan dana sebesar Rp.20.000.000,- setiap tahunnya dari Dana Desa yang akan dimulai tahun 2017.



Surat Keputusan Pemerintah Desa Bedono tentang Dukungan Pendanaan untuk Pemeliharaan Hybrid Engineering

Di saat sosialisasi pengalokasian dana dalam pertemuan bulanan Kelompok Penghijauan Bedono Bangkit di gedung serbaguna Dusun Bedono, Kepala Desa Bedono Bapak H. Agus Salim, S.Pd.I, M.Pd.I menyampaikan bahwa, dukungan dana sebesar dua puluh juta rupiah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Desa Bedono dalam mendukung Program BwN. Dana tersebut nantinya dikelola langsung oleh kelompok bagi perawatan *Hybrid Engineering*, dan penggunaannya akan diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Di depan pengurus dan anggota kelompok Bedono Bangkit, tokoh masyarakat, dan perwakilan Wetlands International Indonesia, Bapak Agus Salim menambahkan bahwa masyarakat dan kelompok Bedono Bangkit juga harus aktif menjaga dan merawat konstruksi HE yang sudah dibangun oleh Program BwN karena manfaatnya akan melindungi kawasan pesisir Dusun Bedono dari erosi yang semakin parah. Harapannya konstruksi HE bisa menangkap

sedimen lebih banyak, membentuk daratan baru dan tanaman mangrove bisa tumbuh alami yang kelak akan menjadi benteng pesisir.

Community Development Officer Wetlands International Indonesia, Didik Fitrianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Bedono yang terlibat aktif mendukung kegiatan Program BwN, tidak hanya berupa kebijakan saja tapi berani mengalokasikan dana bagi perawatan struktur HE. Keputusan pemerintah Desa Bedono ini nantinya bisa diikuti pemerintah desa lain yang menjadi lokasi program agar bisa mengalokasikan pendanaan untuk mendukung kegiatan Program BwN.

Dukungan Pemerintah Desa Bedono bagi program BwN di desanya, tidak terlepas dari usaha keras Tim BwN Demak dalam mengadvokasi pemerintah desa dan penguatan kapasitas kelompok untuk bersinergi dalam proses pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. ••

**Community Development Officer
Wetlands International Indonesia*

Anonim. 2015. Pengembangan Indikator Kerentanan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) Perubahan Iklim. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim. iii + 50

Anonim. 2015. Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup. vii + 100

Galudra, G., M.Sirait, G. Pasyaand {et.al}. 2010. Rata: A Rapid Land Tenure Assessment manual for Identifying thr Nature of Land Tenure Conflicts,World Agroforestry Centre,iii + 80

Naggara, S.G, L. Rosalina, R.Y. Kartika dan A.A. Setyawan. 2017. Enam Tahun ISPO Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak Dampak Negatif seperti Deforestasi, Kerusakan, Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Konflik Tenurial. Forest watch Indonesia. 90

Noordwijk, M.V. 2017. Bunga Rampai dari Kebun Lindung Anthology of Blogs and Grams in the 25 th Year of ICRAF SE Asia. World Agroforestry Center

Noordwijk, M.V.,R.H. Widodo, A. Farida, D.A. Suyanto and {et.al}. 2011. Green River and Flowper User Manual Version 2.0. World Agroforestry Center. xiv + 117

Siahainenia, A.J. 2016. Food from the Sulawesi Sea: the Need for Integrated Sea Use Planning. DIGIFORCE. 180

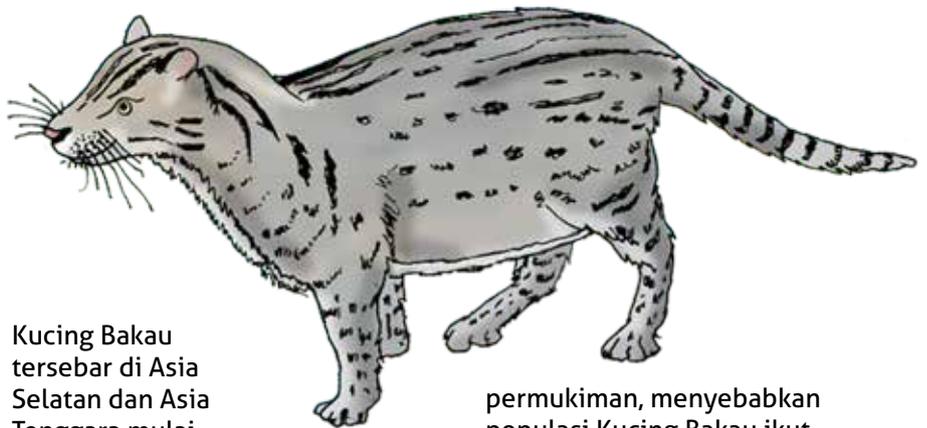
Subarudi,I. Samsuedin, sylviani and {et.al}. 2015. Sintesis Penelitian Integratif Pengemabangan Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan. Kementrian Lingkungan Hidup. xviii + 103

Mengenal Jenis

Kucing Bakau

Kucing Bakau atau hewan dengan nama latin *Prionailurus viverrinus*, adalah kucing liar yang hidup di sepanjang sungai dan rawa-rawa hutan mangrove. Merupakan hewan yang aktif di malam hari (nocturnal) dan biasanya hidup secara soliter. Memiliki panjang tubuh mencapai 78cm dengan ekor sepanjang 20-30cm, bentuk tapak kaki berselaput.

Makanan utama Kucing Bakau adalah ikan, selain itu juga memangsa udang, tikus, katak dan ular. Tidak seperti kucing peliharaan yang takut akan air, Kucing Bakau justru sebaliknya malah dikenal sebagai jenis kucing yang handal berenang dan menyelam terutama ketika sedang menangkap mangsanya di dalam air.



Kucing Bakau tersebar di Asia Selatan dan Asia Tenggara mulai dari Bangladesh, Bhutan, Kambodia, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, Kucing Bakau dapat dijumpai pada lokasi-lokasi tertentu di pulau Jawa mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, beberapa terdapat pula di daerah lainnya misalnya Kalimantan.

Seiring rusak dan hilangnya habitat hutan mangrove akibat dikonversi menjadi lahan pertanian, pertambangan dan

permukiman, menyebabkan populasi Kucing Bakau ikut menurun secara drastis. Kucing Bakau saat ini terdaftar sebagai *Endangered* dalam IUCN *Redlist* dan CITES Apendiks II. Di Indonesia, Kucing Bakau ini, juga termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999.

Ancaman konversi hutan mangrove harus segera dihentikan, agar ekosistem hutan mangrove yang memiliki banyak fungsi dan manfaat dapat terus terjaga, dan Kucing Bakau yang unik turut lestariakan. ••

WETLANDS INTERNATIONAL

GLOBAL OFFICE

PO Box 471
6700 AL Wageningen
The Netherlands
post@wetlands.org
www.wetlands.org

INDONESIA

Jl. Bango No. 11
Bogor 16161
admin@wetlands.or.id
http://indonesia.wetlands.org

ISSN:
0854-963X

Foto Cover:
Hybrid Engineering
di pesisir Desa Timbulsloko,
Kabupaten Demak
(Foto: Aswin R. dan Apri S.)

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) adalah majalah yang diterbitkan oleh Wetlands International Indonesia secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulan), dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di Indonesia. WKLB diterbitkan untuk mewadahi informasi-informasi seputar perlahanbasahan di Indonesia yang disampaikan oleh berbagai kalangan baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan media WKLB ini dapat turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola lahan basah secara bijak dan berkesinambungan.



Wetlands International



@WetlandsInt



Wetlands International



Ditjen. KSDAE,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



Wetlands
INTERNATIONAL

Pencetakan warta ini didanai oleh Program PfrSP - Partners for Resilience Strategic Partnership



PARTNERS FOR RESILIENCE

Jumlah kejadian bencana alam dan bencana akibat kelalaian manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Selain itu, perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan juga semakin meningkatkan resiko bencana terutama bagi kalangan miskin yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Oleh karenanya, sebuah pendekatan pengelolaan resiko bencana yang terintegrasi sangatlah diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat.

Di Belanda, Partners for Resilience Strategic Partnership (PfrSP) merupakan sebuah aliansi yang terdiri lima organisasi yakni CARE Netherland, Cordaid, the Netherlands Red Cross, the Red Cross Red Crescent Climate Centre dan Wetlands International yang bersama-sama mengembangkan program kemitraan strategis, untuk mendorong penerapan pengelolaan resiko yang terintegrasi / Integrated Risk Management (IRM) mulai dari tingkat global hingga di tingkat lokal. IRM merupakan sebuah pendekatan pengelolaan resiko bencana yang menggabungkan 3 pendekatan yakni pengurangan resiko bencana (DRR), adaptasi perubahan iklim (CCA) dan restorasi dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (ERM). Ketiga pendekatan ini digunakan untuk mendorong penerapan IRM dalam domain kebijakan, praktek dan investasi.

Di Indonesia, PfrSP beranggotakan 5 organisasi yang masing-masing merupakan perwakilan dari organisasi yang beraliansi di tingkat global. Kelima organisasi tersebut antara lain CARE International Indonesia, the Indonesian Red Cross (Palang Merah Indonesia), Wetlands International Indonesia, Karina KWI Yogyakarta dan the Red Cross Climate Centre. Kelima organisasi ini berkolaborasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia dengan mendorong implementasi IRM, yang dielaborasi ke dalam 5 lintasan kerja. Masing-masing lintasan kerja dipimpin oleh satu organisasi.

Wetlands International Indonesia (WII) menjadi salah satu anggota aliansi PfrSP Indonesia yang memimpin kegiatan lobby dan advokasi IRM di lintasan kerja/trajjectory 4. Lintasan ini bertujuan untuk mendorong penerapan IRM didalam rencana investasi pembangunan *lowlands ecosystem* yang bijaksana dan berkelanjutan (khususnya kawasan ekosistem mangrove dan gambut).